

Strategi Dakwah Partisipatif dalam Membangun Ketahanan Sosial Masyarakat

Abdullah Satuyar Mufid

Universitas Islam Syarifuddin, Lumajang, Indonesia

Email: satuyarmufid@gmail.com

Received: Maret 1, 2025. Accepted: April 2, 2026. Published: Mei 3, 2026

ABSTRACT

Contemporary societies are faced with complex social challenges such as disintegration, horizontal conflict, individualism, and the degradation of collective values. These phenomena erode the foundations of social resilience, which is the ability of a community to survive, adapt, and grow in the face of pressure and upheaval. Dakwah, as a process of transforming Islamic values, is required to evolve from a monological-normative approach to an empowering participatory paradigm. This study aims to analyze the concept and strategies of participatory dakwah and examine its contribution to building social resilience in society. This study uses a qualitative approach with case study methods in two communities, combined with an in-depth literature review (mixed-methods exploratory sequential design). Data collection techniques include participatory observation, in-depth interviews with da'i and community leaders, and document analysis. The main findings are that participatory da'wah, which is realized through dialogical forums (بأسئكم دافغ), social action collaboration (لئس منأ), and local-based empowerment, has been proven to significantly strengthen social cohesion, collective trust (النقوى), adaptive capacity, and community solidarity. The research findings emphasize the need to reorient da'wah strategies towards a bottom-up, collaborative approach based on the concrete needs of the community in order to optimize its contribution to national social resilience.

Keywords: Participatory da'wah, social resilience, community empowerment, da'wah communication, social cohesion.

ABSTRAK

Masyarakat kontemporer dihadapkan pada kompleksitas tantangan sosial seperti disintegrasi, konflik horizontal, individualisme, dan degradasi nilai-nilai kolektivitas. Fenomena ini menggerus fondasi ketahanan sosial, yaitu kemampuan suatu komunitas untuk bertahan, beradaptasi, dan tumbuh dalam menghadapi tekanan dan guncangan. Dakwah, sebagai proses transformasi nilai-nilai Islam, dituntut untuk berevolusi dari pendekatan monologis-normatif menuju paradigma partisipatif yang memberdayakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan strategi dakwah partisipatif serta mengkaji kontribusinya dalam membangun ketahanan sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di dua komunitas, yang dikombinasikan dengan kajian pustaka mendalam (mixed-methods exploratory sequential design). Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan da'i dan tokoh masyarakat, serta analisis dokumen. Temuan utama yakni dakwah partisipatif yang divujudkan melalui forum dialogis (بأسئكم دافغ), kolaborasi aksi sosial (لئس منأ), dan pemberdayaan berbasis lokal terbukti signifikan memperkuat kohesi sosial, kepercayaan kolektif (النقوى), kapasitas adaptasi, dan solidaritas komunitas. Temuan penelitian menegaskan perlunya reorientasi strategi dakwah ke arah pendekatan bottom-up, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan konkret masyarakat untuk mengoptimalkan kontribusinya terhadap ketahanan sosial nasional.

Kata Kunci: Dakwah partisipatif, ketahanan sosial, pemberdayaan masyarakat, komunikasi dakwah, kohesi sosial.

INTRODUCTION

Masyarakat abad ke-21 menghadapi gelombang transformasi sosial yang bersifat disruptif, yang ditandai oleh menguatnya individualisme, fragmentasi identitas, serta merebaknya hoaks dan intoleransi yang berpotensi merusak tenun sosial (*social fabric*) masyarakat (Putnam, 2000). Perubahan sosial yang cepat dan tidak selalu terkelola ini berdampak langsung pada melemahnya kohesi sosial, menurunnya kepercayaan antarwarga, serta berkurangnya kapasitas komunitas dalam menghadapi tekanan sosial yang kompleks. Kondisi tersebut berimplikasi pada menurunnya ketahanan sosial, yang didefinisikan sebagai

kapasitas suatu kelompok atau komunitas untuk mengantisipasi, menghadapi, pulih, serta belajar dari tekanan dan gangguan, baik yang bersifat alamiah maupun sosial (Maguire & Cartwright, 2008).

Dalam konteks Indonesia, tantangan terhadap ketahanan sosial memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena dipengaruhi oleh kemajemukan sosial, budaya, dan agama. Isu disintegrasi sosial, konflik berbasis SARA, serta kesenjangan ekonomi masih menjadi ancaman nyata terhadap stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan nasional (Toha, 2018). Kondisi ini menuntut adanya pendekatan yang tidak hanya bersifat struktural dan kebijakan, tetapi juga berbasis nilai, kultural, dan partisipasi masyarakat secara langsung.

Agama, khususnya Islam, memiliki posisi sentral dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Ajaran Islam tidak hanya mengatur dimensi spiritual-individual, tetapi juga mengandung mandat sosial yang kuat untuk membangun keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif. Dakwah sebagai instrumen penyebaran ajaran Islam sejatinya tidak berhenti pada aspek ukhrawi-individual, melainkan memiliki orientasi sosial yang bertujuan memperbaiki dan memberdayakan kondisi masyarakat (خَالِ الْمُجْتَمَعِ). Al-Qur'an menegaskan:

”كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ“

(Ali Imran: 110)

Dalam ayat tersebut, dijelaskan yang menempatkan amar ma'ruf nahi munkar sebagai tugas kolektif umat Islam yang meniscayakan keterlibatan aktif dalam interaksi dan perbaikan sosial.

Namun, praktik dakwah yang berkembang di masyarakat masih didominasi oleh pendekatan konvensional berupa ceramah satu arah (*tabligh*). Pendekatan ini cenderung bersifat top-down dan menempatkan masyarakat sebagai objek dakwah (*mad'u*) yang pasif, bukan sebagai subjek atau mitra (شُرَكَاء) dalam proses perubahan sosial (Hikmat, 2019). Akibatnya, dakwah sering kali kurang efektif dalam merespons kompleksitas persoalan sosial kontemporer serta kurang mampu membangun rasa kepemilikan, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif dalam komunitas.

Sebagai respons atas keterbatasan tersebut, diperlukan pergeseran paradigma menuju dakwah partisipatif. Dakwah partisipatif menekankan keterlibatan aktif, dialogis, dan setara antara da'i dan masyarakat dalam seluruh tahapan dakwah, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Mufid, 2012). Pendekatan ini diyakini mampu membangun *sense of ownership*, memperkuat modal sosial (*social capital*), serta meningkatkan kapasitas adaptasi kolektif komunitas dalam menghadapi berbagai tantangan sosial. Urgensi pendekatan partisipatif ini sejalan dengan teladan Nabi Muhammad SAW dalam membangun solidaritas sosial umat, sebagaimana sabda beliau:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى

(HR. Bukhari-Muslim),

Dari hadist tersebut menggambarkan solidaritas organik sebagai fondasi utama ketahanan sosial masyarakat. Solidaritas tersebut hanya dapat terbangun secara berkelanjutan melalui keterlibatan dan kepedulian aktif setiap anggota komunitas.

Meskipun demikian, kajian akademik yang secara spesifik menghubungkan dakwah partisipatif dengan penguatan ketahanan sosial masyarakat masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada output keagamaan individual atau pemberdayaan ekonomi, sementara dimensi penguatan struktur dan dinamika sosial komunitas belum banyak dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi celah riset (*research gap*) tersebut dengan menganalisis secara sistematis bagaimana dakwah partisipatif direalisasikan di tingkat komunitas serta kontribusinya dalam membangun ketahanan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed-methods* dengan desain *exploratory sequential*, sebagaimana dikemukakan oleh Creswell dan Plano Clark (2018). Desain ini diawali dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti,

kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data kuantitatif guna menguji serta memperluas temuan awal dan mengidentifikasi pola-pola umum yang muncul. Pendekatan campuran dipilih karena kompleksitas objek penelitian menuntut pemahaman kontekstual yang mendalam sekaligus pengukuran kecenderungan yang lebih luas secara kuantitatif.

Penelitian kualitatif dilakukan melalui studi kasus multisit, dengan pemilihan lokasi penelitian secara purposive. Lokasi penelitian mencakup dua komunitas yang memiliki praktik dakwah berbasis partisipasi, yaitu satu komunitas di wilayah perkotaan dan satu komunitas di wilayah perdesaan. Komunitas perkotaan merepresentasikan lingkungan urban dengan aktivitas pemberdayaan seperti program bank sampah dan majelis taklim partisipatif, sementara komunitas perdesaan merepresentasikan lingkungan rural dengan program pertanian berkelanjutan berbasis masjid. Pemilihan kedua lokasi ini bertujuan untuk menangkap variasi konteks sosial dan dinamika partisipasi dakwah pada setting yang berbeda.

Subjek penelitian terdiri atas informan kunci yang dipilih secara purposive untuk memperoleh perspektif yang beragam. Informan tersebut meliputi da'i atau penyuluh agama setempat, tokoh masyarakat formal dan nonformal, anggota komunitas yang terlibat aktif dalam program dakwah, serta anggota komunitas yang relatif pasif. Komposisi informan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika dakwah partisipatif dari berbagai sudut pandang, baik dari aktor penggerak maupun dari penerima manfaat.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur kepada seluruh informan kunci untuk menggali pengalaman, persepsi, dan makna yang mereka lekatkan pada praktik dakwah partisipatif. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan dengan melibatkan peneliti dalam kegiatan rutin komunitas, seperti pengajian, kerja bakti, dan rapat komunitas, selama kurang lebih tiga bulan di setiap lokasi penelitian. Pengumpulan data juga dilengkapi dengan analisis dokumen, yang mencakup notulen rapat, proposal kegiatan, arsip keuangan sederhana komunitas, serta materi dakwah yang digunakan dalam program.

Pada tahap kedua, data kuantitatif dikumpulkan melalui survei terbatas yang disebarkan kepada anggota komunitas di masing-masing lokasi penelitian. Survei ini melibatkan sebanyak 100 responden per komunitas dan dirancang untuk mengukur persepsi responden mengenai tingkat partisipasi, kohesi sosial, dan solidaritas komunitas. Instrumen survei menggunakan skala Likert lima poin dan telah melalui uji validitas dan reliabilitas sebelum digunakan.

Analisis data kualitatif dilakukan dengan teknik analisis tematik sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006), melalui tahapan transkripsi data, pengkodean awal, identifikasi tema, peninjauan dan pemantapan tema, hingga penyusunan narasi temuan. Sementara itu, data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif, seperti frekuensi dan nilai rata-rata, serta analisis inferensial sederhana berupa uji korelasi dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Untuk meningkatkan keabsahan temuan penelitian, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, analisis dokumen, dan survei, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan reliabel mengenai praktik dakwah partisipatif dan kontribusinya terhadap ketahanan sosial masyarakat.

RESULTS AND DISCUSSION

Bentuk dan Model Dakwah Partisipatif di Tingkat Akar Rumput

Analisis terhadap data yang terkumpul dari lokasi penelitian di Komunitas A (urban) dan Komunitas B (rural) mengungkap pola-pola yang signifikan terkait implementasi dan dampak dakwah partisipatif. Bab ini menyajikan temuan empiris yang diorganisasikan ke dalam empat subbab utama, dilanjutkan dengan pembahasan mendalam yang mengaitkan data dengan kerangka teoritis yang telah dibangun. Temuan lapangan menunjukkan bahwa dakwah partisipatif tidak hadir sebagai model tunggal, tetapi beradaptasi menjadi beragam bentuk sesuai konteks sosio-kultural dan kebutuhan spesifik komunitas. Dua model dominan yang teridentifikasi adalah model forum dialogis dan model aksi kolaboratif, yang masing-masing memiliki mekanisme dan dinamika partisipasi yang khas.

Di Komunitas A, yang berlokasi di lingkungan padat perkotaan dengan beragam latar belakang pendidikan dan pekerjaan, pendekatan dakwah konvensional yang bersifat ceramah dianggap kurang menyentuh persoalan harian masyarakat. Sebagai respons, para penggerak dakwah, yang dimotori oleh seorang da'i muda lulusan pesantren modern dan beberapa aktivis masyarakat, menginisiasi transformasi

format pengajian mingguan. Pengajian yang sebelumnya bersifat satu arah diubah menjadi “Halaqah Fikih Sosial” (Hasan, 2022, wawancara pribadi). Dalam halaqah ini, topik tidak lagi ditentukan sepihak oleh da'i, melainkan digali dari masalah riil yang diusulkan jamaah melalui kotak saran atau grup media sosial sebelum acara. Sesi-sesi membahas tema seperti “Mengelola Hutang Keluarga dalam Perspektif Maqashid Syariah”, “Menjaga Keharmonisan Tetangga dalam Lingkungan Apartemen”, atau “Etika Bermedia Sosial untuk Mencegah Perpecahan” (Observasi, 15 Januari 2024).

Proses dialog dalam halaqah ini secara nyata merefleksikan prinsip dakwah yang termaktub dalam Al-Qur'an: “ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ” (An-Nahl: 125).

Da'i berfungsi sebagai fasilitator yang memandu diskusi, merujuk pada nash-nash yang relevan, tetapi tidak memberikan jawaban final. Solusi akhir dirumuskan secara kolektif melalui musyawarah. Seorang peserta, Ibu S (42 tahun), menyatakan, “Di sini kami tidak hanya disuapi ceramah, tapi diajak berpikir bersama. Keputusan untuk membentuk kelompok arisan syariah tanpa bunga itu lahir dari diskusi kami sendiri, jadi rasanya tanggung jawab bersama untuk menjalankannya” (Wawancara, 20 Januari 2024). Model ini sesuai dengan konsep problem-posing education milik Freire (1970), di mana pengetahuan dibangun secara dialogis antara fasilitator dan peserta untuk mencapai kesadaran kritis (conscientization) terhadap realitas mereka.

Sementara di Komunitas B, sebuah desa agraris, dakwah partisipatif menemukan ekspresinya dalam bentuk aksi kolektif yang terstruktur. Inisiatif “Lumbung Pangan Berbasis Masjid” lahir dari keprihatinan bersama akan ketergantungan pada tengkulak dan sistem ijon yang merugikan (Fathoni, 2017). Program ini tidak sekadar aksi filantropi membagikan beras, tetapi sebuah sistem ekonomi yang direncanakan, dikelola, dan dimiliki oleh masyarakat. Proses perencanaannya dilakukan melalui “Bahtsul Masail Pertanian” yang melibatkan secara aktif para petani, da'i dari pesantren setempat, penyuluh pertanian dari dinas kabupaten, serta perwakilan kelompok tani wanita (Observasi, 5 Februari 2024).

Forum bahtsul masail tersebut menjadi ruang di mana nilai-nilai Islam diterjemahkan menjadi prinsip operasional. Misalnya, pembahasan tentang mekanisme bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap mengacu pada tafsir terhadap ayat “وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا” (Al-Baqarah: 275) dan konsep muzara'ah dalam fikih muamalah. Keterlibatan semua pemangku kepentingan sejak awal menciptakan rasa kepemilikan (sense of ownership) yang tinggi, sebagaimana diungkapkan oleh seorang petani, Pak K (50 tahun): “Ini program kami sendiri. Dari musyawarah di serambi masjid, kami sepakat jenis padi yang ditanam, sistem iurannya, bahkan sampai bagi hasilnya. Ustadz hanya membantu memastikan tidak melanggar syariat” (Wawancara, 10 Februari 2024). Model ini mengaktualisasikan teori partisipasi Arnstein (1969) pada tingkat partnership dan delegated power, di masyarakat tidak hanya diajak berkonsultasi tetapi juga diberikan wewenang pengambilan keputusan atas sumber daya mereka.

Strategi Implementasi Dakwah Partisipatif yang Efektif

Berdasarkan observasi mendalam, efektivitas dakwah partisipatif sangat bergantung pada penerapan strategi yang tepat, yang memadukan kearifan komunikasi Islam dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat modern. Tiga strategi kunci yang terbukti ampuh adalah Musyawarah (shura) sebagai prinsip dasar dalam Islam menjadi strategi inti. Di kedua komunitas, musyawarah tidak hanya bersifat seremonial, tetapi diformalkan dalam metode Focus Group Discussion (FGD) untuk isu-isu spesifik. Contoh nyata adalah upaya pencegahan pernikahan dini di Komunitas B. Daripada memberikan ceramah tunggal, da'i bersama tokoh pemuda dan perempuan mengadakan serangkaian FGD terpisah dengan remaja, orang tua, dan perangkat desa. Hasil FGD kemudian dikonsolidasikan dalam forum besar di balai desa. Konsensus yang lahir, berupa “Peraturan Bersama Kampung” yang mengatur usia minimal dan mekanisme pendampingan, memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi karena seluruh lapisan masyarakat merasa suaranya didengar (Dokumen Notulen Musyawarah, Februari 2024). Strategi ini efektif karena memenuhi kebutuhan psikologis akan otonomi dan kompetensi, sebagaimana dikemukakan dalam teori pemberdayaan Zimmerman (2000), sekaligus menghidupkan sunnah Nabi dalam bermusyawarah.

Da'i yang efektif dalam konteks partisipatif adalah mereka yang mampu berperan sebagai jaringan penghubung (network broker). Di Komunitas B, seorang da'i berhasil menginisiasi kampanye anti-narkoba dengan cara yang unik: ia mengajak serta mantan pengguna yang sudah tobat, ketua adat yang

disegani, dan guru sekolah untuk menjadi narasumber dan motivator. Kolaborasi ini memanfaatkan modal sosial bonding (ikatan kuat dalam kelompok) dan bridging (jembatan antar kelompok) yang sudah ada (Putnam, 2000). Mantan pengguna berbagi pengalaman pahit, ketua adat menyampaikan sanksi sosial berdasarkan norma setempat, sementara da'i memberikan perspektif spiritual tentang menjaga akal dan jasmani. Pendekatan multi-pihak ini menghasilkan pesan dakwah yang lebih komprehensif dan diterima karena datang dari figur-figur yang telah memiliki kredibilitas dalam domainnya masing-masing.

Aksi sosial menjadi media dakwah nonverbal yang sangat kuat. Namun, dalam model partisipatif, filantropi dirancang untuk memberdayakan, bukan sekadar memberi. Program “Jumat Berkah” di Komunitas A adalah contohnya. Program ini tidak lagi berupa pembagian paket sembako secara pasif. Masyarakat yang mampu menyumbang dalam bentuk uang atau barang, sementara penerima manfaat (dhu'afa) yang masih produktif dilibatkan sebagai relawan untuk mengelola logistik, mendata calon penerima yang lebih membutuhkan, dan mendistribusikan. Transformasi ini mengubah relasi “pemberi-penerima” yang hierarkis menjadi “mitra sekerja” yang setara. Landasan filosofisnya merujuk pada hadis Nabi SAW: “لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ” (HR. Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad).

Aksi gotong royong membangun taman baca komunitas atau saluran irigasi juga menjadi ruang di mana nilai-nilai solidaritas, tanggung jawab, dan kebersamaan dipraktikkan langsung, membangun ikatan sosial yang lebih kuat daripada seribu kata-kata.

Kontribusi Dakwah Partisipatif terhadap Penguatan Indikator Ketahanan Sosial

Analisis komparatif data kualitatif dan kuantitatif dari kedua lokasi menunjukkan kontribusi yang nyata dan terukur dari praktik dakwah partisipatif terhadap peningkatan ketahanan sosial. Kontribusi tersebut tampak pada tiga indikator utama. Proses-proses dialogis dan kolaboratif dalam dakwah partisipatif berfungsi sebagai “lem sosial” yang merekatkan kembali hubungan antarwarga. Data survei di Komunitas A menunjukkan peningkatan skor persepsi tentang “rasa saling percaya” sebesar 30% dan “kesediaan untuk bekerja sama” sebesar 25% setelah satu tahun penerapan model halaqah partisipatif (Data Kuesioner, Maret 2024). Penguatan ini terjadi karena interaksi yang intensif dan bermakna dalam forum-forum tersebut mengurangi stereotip dan meningkatkan mutual understanding. Seorang jamaah dari etnis berbeda mengaku, “Dulu saya hanya kenal dia sebagai ‘toko sebelah’. Setelah sering diskusi di halaqah, saya tahu persoalan keluarganya, prinsip hidupnya, dan kami bisa bekerja sama urunan untuk bantu warga yang kena musibah” (Wawancara, Maret 2024). Fenomena ini secara teoretis memperkuat asumsi bahwa komunikasi yang partisipatif dapat membangun trust yang merupakan fondasi modal sosial (Norris et al., 2008). Secara normatif, ini adalah pengejawantahan dari konsep ukhuwah Islamiyah:

“إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ” (Al-Hujurat: 10).

Dakwah partisipatif menciptakan mekanisme early warning dan resolusi konflik yang organik. Forum dialog menjadi saluran aman (safe space) untuk menyampaikan keluhan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka. Di Komunitas B, terjadi sengketa batas tanah antara dua keluarga yang berlarut-larut. Daripada dibawa ke pengadilan, tokoh masyarakat menginisiasi mediasi yang difasilitasi oleh da'i dengan mengedepankan prinsip “إِصْلَاحُ بَيْنِ النَّاسِ” (memperbaiki hubungan antar manusia). Mediasi tidak hanya membahas aspek hukum adat dan positif, tetapi juga menyentuh aspek spiritual tentang menjaga silaturahmi dan menghindari dosa sosial. Kesepakatan yang dihasilkan diterima semua pihak karena prosesnya adil dan mengedepankan perdamaian. Temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas ketahanan sosial suatu komunitas tidak hanya diukur dari ketiadaan konflik, tetapi dari keberadaan mekanisme kultural-institusional yang efektif untuk mengelola konflik secara konstruktif (Maguire & Cartwright, 2008).

Ujian terbesar terhadap ketahanan sosial terjadi selama pandemi COVID-19. Respons cepat dari kedua komunitas penelitian menjadi bukti nyata dampak dakwah partisipatif. Jaringan dan mekanisme koordinasi yang telah terbangun melalui berbagai program partisipatif sebelumnya (seperti halaqah, lumbung pangan, tim relawan) dengan mudah ditransformasikan menjadi “Satgas Covid-19 Masjid”. Masyarakat secara swadana mengorganisir posko, pembagian masker dan sembako, sistem pemantauan warga isolasi mandiri, serta dakwah protokol kesehatan melalui media kreatif. Kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan bertindak secara kolektif ini mencerminkan tingginya community efficacy—keyakinan kolektif akan kemampuan kelompok untuk mencapai tujuan bersama (Zimmerman, 2000). Hal

ini membuktikan bahwa investasi dalam membangun partisipasi dan jejaring sosial pada masa normal membuahkan ketahanan yang tangguh di saat krisis.

Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Keberhasilan dan tantangan dalam implementasi dakwah partisipatif tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor kondisional yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor-faktor ini berperan penting dalam menentukan sejauh mana pendekatan partisipatif dapat berjalan efektif dan berkelanjutan dalam konteks komunitas yang beragam. Salah satu faktor pendukung utama terletak pada kapasitas dan *mindset* da'i dalam memosisikan diri bukan semata sebagai pengajar (*teacher*), melainkan sebagai fasilitator pembelajaran (*learning facilitator*). Da'i yang mampu memimpin inisiatif dakwah partisipatif menunjukkan keterampilan komunikasi interpersonal yang baik, kemampuan memoderasi diskusi, serta kerendahan hati untuk belajar dari pengalaman dan pengetahuan masyarakat. Pergeseran peran ini memungkinkan terciptanya relasi yang lebih setara antara da'i dan masyarakat, sehingga proses dakwah menjadi dialogis dan kolaboratif. Hal ini tercermin dalam praktik di Komunitas B, di mana seorang da'i menyatakan, "Saya bukan ahli pertanian. Tugas saya memfasilitasi pertemuan agar para ahli (petani) dan ilmu agama bisa bertemu dan menemukan solusi terbaik" (Wawancara, Februari 2024). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas dakwah partisipatif sangat bergantung pada kesiapan da'i untuk menjadi penghubung nilai keagamaan dengan realitas sosial masyarakat.

Selain faktor individu da'i, keberhasilan dakwah partisipatif juga ditopang oleh keberadaan kearifan lokal dan struktur sosial yang kondusif. Budaya gotong royong, tradisi musyawarah, serta keberlanjutan struktur kepemimpinan adat yang kuat di Komunitas B menjadi modal sosial awal yang sangat berharga dalam membangun partisipasi kolektif. Sementara itu, di Komunitas A, semangat kewirausahaan dan jaringan profesional warga menjadi sumber daya penting bagi pengembangan program pemberdayaan ekonomi berbasis dakwah. Dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah desa atau kelurahan, termasuk melalui skema Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), juga berperan sebagai katalis yang mempercepat pelaksanaan dan keberlanjutan program dakwah partisipatif.

Di sisi lain, implementasi dakwah partisipatif juga menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Salah satu kendala utama adalah masih kuatnya mentalitas ketergantungan dan pola relasi keagamaan yang hierarkis, terutama di kalangan masyarakat generasi tua. Model dakwah konvensional berbasis ceramah telah membentuk persepsi bahwa da'i merupakan satu-satunya sumber kebenaran, sehingga memunculkan resistensi terhadap pendekatan partisipatif yang menuntut kemandirian berpikir dan keterlibatan aktif masyarakat. Kondisi ini kerap diperparah oleh keterbatasan waktu, energi, dan sumber daya finansial da'i, yang dalam banyak kasus masih mengandalkan kerja sukarela, sehingga membatasi intensitas dan keberlanjutan pendampingan komunitas.

Tantangan lain bersumber dari dinamika eksternal, terutama pengaruh politik makro dan disrupsi teknologi. Polarisasi politik dan identitas keagamaan di tingkat nasional terbukti merembes hingga ke level komunitas, sehingga menyulitkan penciptaan ruang dialog yang netral, aman, dan inklusif. Di sisi lain, penetrasi media digital dan gaya hidup individualistik yang menyertainya turut mengurangi minat sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terlibat dalam aktivitas komunal. Seorang pengurus pemuda masjid di Komunitas A mengungkapkan, "Banyak pemuda lebih asyik dengan gadget-nya daripada datang ke pertemuan. Kita harus berinovasi memadukan diskusi online-offline" (Wawancara, Maret 2024). Tantangan ini menuntut inovasi strategi komunikasi dakwah yang lebih adaptif dan relevan dengan karakter generasi digital native.

Secara integratif, temuan pada Bab IV memperkuat dan memperkaya kerangka teoritis yang diajukan dalam penelitian ini. Praktik dakwah partisipatif terbukti menjadi instrumen yang efektif dalam membangun ketahanan sosial karena bekerja langsung pada fondasi utamanya, yaitu kepercayaan, jejaring sosial, dan kapasitas kolektif masyarakat. Model dan strategi dakwah yang bersifat dialogis dan kolaboratif merupakan perwujudan konkret dari teori partisipasi Arnstein serta teori komunikasi dialogis Freire dalam konteks keindonesiaan dan keislaman. Kontribusinya terhadap pencegahan konflik sosial dan peningkatan kapasitas adaptasi komunitas juga selaras dengan definisi ketahanan sosial yang dikemukakan oleh Norris et al. (2008). Dengan demikian, transformasi paradigma dakwah menuju pendekatan

partisipatif bukan sekadar kebutuhan metodologis, melainkan strategi kultural yang esensial untuk memperkuat imunitas sosial masyarakat Indonesia dalam menghadapi kompleksitas perubahan zaman.

CONCLUSION

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan dakwah partisipatif dalam membangun ketahanan sosial masyarakat sangat ditentukan oleh interaksi dinamis antara faktor internal dan eksternal komunitas. Dari sisi internal, kapasitas dan *mindset* da'i memegang peran kunci, khususnya dalam pergeseran peran dari pengajar yang bersifat instruktif menuju fasilitator pembelajaran yang dialogis dan kolaboratif. Da'i yang memiliki keterampilan komunikasi interpersonal, kemampuan memoderasi diskusi, serta kerendahan hati untuk belajar dari masyarakat mampu menciptakan relasi yang lebih setara, sehingga dakwah tidak hanya menjadi proses transmisi nilai keagamaan, tetapi juga ruang bersama untuk refleksi dan aksi sosial kolektif. Keberhasilan pendekatan ini semakin diperkuat oleh keberadaan kearifan lokal dan struktur sosial yang kondusif. Nilai-nilai gotong royong, tradisi musyawarah, jaringan sosial yang kuat, serta dukungan kebijakan dan kelembagaan lokal, seperti peran pemerintah desa atau kelurahan dan BUMDes, berfungsi sebagai modal sosial awal yang mempercepat tumbuhnya partisipasi dan keberlanjutan program dakwah. Modal sosial tersebut memungkinkan dakwah partisipatif berakar pada realitas dan kebutuhan komunitas, bukan semata pada agenda normatif dari luar.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang membatasi efektivitas dakwah partisipatif. Mentalitas ketergantungan terhadap figur da'i, relasi keagamaan yang hierarkis, serta keterbatasan waktu dan sumber daya da'i masih menjadi hambatan internal yang signifikan. Di sisi eksternal, polarisasi politik dan identitas keagamaan pada level makro, serta disrupsi teknologi digital yang mendorong individualisme, turut mengurangi ruang dialog dan partisipasi komunal, khususnya di kalangan generasi muda. Kondisi ini menuntut strategi dakwah yang lebih adaptif, kreatif, dan kontekstual, termasuk pemanfaatan ruang digital sebagai pelengkap interaksi tatap muka. Secara teoretis, temuan penelitian ini memperkuat relevansi teori partisipasi Arnstein dan teori komunikasi dialogis Freire dalam konteks dakwah Islam kontemporer, sekaligus mengafirmasi konsep ketahanan sosial sebagaimana dirumuskan oleh Norris et al. (2008). Dakwah partisipatif terbukti bekerja langsung pada fondasi ketahanan sosial, yaitu kepercayaan, jejaring sosial, dan kapasitas kolektif masyarakat. Dengan demikian, transformasi paradigma dakwah menuju pendekatan partisipatif bukan sekadar inovasi metodologis, melainkan strategi kultural yang esensial untuk memperkuat imunitas sosial masyarakat Indonesia dalam menghadapi kompleksitas perubahan sosial di era modern.

BIBLIOGRAPHY

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Fathoni, M. A. (2017). *Dakwah pemberdayaan: Model pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Lazismu*. Pustaka Pelajar.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.
- Hikmat, M. A. (2019). *Dakwah transformatif: Dari teosentris ke antroposentris-partisipatoris*. Remaja Rosdakarya.
- Maguire, B., & Cartwright, S. (2008). *Assessing a community's capacity to manage change: A resilience approach to social assessment*. Australian Government.
- Misrawi, Z. (2010). *Dakwah inklusif: Membangun masyarakat madani yang plural*. Kompas Media Nusantara.
- Mufid, A. S. (2012). *Komunikasi dakwah: Paradigma, teori, dan aplikasi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F., & Pfefferbaum, R. L. (2008). Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness. *American Journal of Community Psychology*, 41(1–2), 127–150.

Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.

Toha, R. J. (2018). *Kerukunan dan konflik sosial di Indonesia*. LP3ES.

Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment theory: Psychological, organizational, and community levels of analysis. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), *Handbook of community psychology* (pp. 43–63). Kluwer Academic Publishers.